



PERUBAHAN RENJA-PD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAPPELITBANGDA KOTA TERNATE
2025



TAHUN 2025





WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 156.1/III.2/KT/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dihitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2025 yang mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

SKPD	BAG. HURUM

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 619)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SKPD	BAG. HUKUM
f	f

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Penutup

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini, yang merupakan Perubahan Rencana Kerja dari masing-masing Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2025, antara lain :

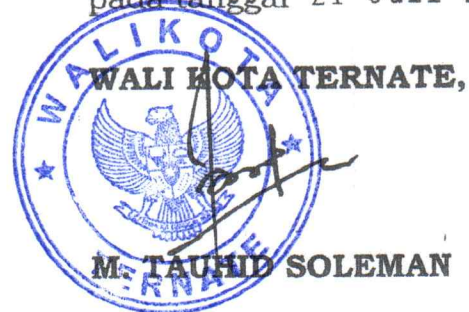
- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan;
- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g) Dinas Kebakaran;
- h) Dinas Sosial;
- i) Dinas Tenaga Kerja;
- j) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- k) Dinas Ketahanan Pangan;
- l) Dinas Lingkungan Hidup;
- m) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- n) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- o) Dinas Perhubungan;
- p) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian;
- q) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- r) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s) Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- t) Dinas Kebudayaan;
- u) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
- v) Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w) Dinas Pariwisata;
- x) Dinas Pertanian;
- y) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- z) Sekretariat Daerah;
- aa) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- ö) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- aa) Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
- ee) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- ff) Inspektorat;
- gg) Kecamatan Kota Ternate Utara;

SEPD	BAG. BUKU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- hh) Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- ii) Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- jj) Kecamatan Pulau Ternate;
- kk) Kecamatan Ternate Barat;
- ll) Kecamatan Pulau Hiri;
- mm) Kecamatan Moti;
- nn) Kecamatan Pulau Batang Dua; dan
- ll) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Juli 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Ternate, di Ternate;
2. Inspektur Kota Ternate, di Ternate;
3. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, di Ternate; dan
4. Para Kepala SKPD Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM
f	1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	15
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah beserta perubahannya merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja beserta perubahannya mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta perubahannya, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pada pasal 360 Perangkat daerah menyusun rancangan Perubahan RENJA Perangkat daerah.

Perubahan RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate tidak lepas dari target kinerja yang telah dituangkan dalam Rancangan akhir Renstra Bappelitbangda tahun 2025-2029 dan juga dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232);
16. Peraturan Walikota Ternate Nomor 34.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 499.A);
17. Peraturan Walikota Ternate Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 619).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Ternate antara lain :

- Menyelaraskan Renja PD dengan Perubahan RKPD agar tetap selaras dengan arah pembangunan daerah;
- Memastikan target kinerja tetap realistis dan dapat dicapai;

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Ternate ini antara lain:

- Menyesuaikan Program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja agar lebih efektif.
- Mengakomodasi realokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan riil;
- Menyelaraskan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi realisasi capaian target Rencana Kerja juga merupakan tahun pertama Renstra Bappelitbangda 2025-2029, yang menggambarkan tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan. Data selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Bappelibangda yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Bappelibangda Kota Ternate secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel berikut:

Kode					Bidang / OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	PERUBAHAN 2025		REALISASI TRIWULAN II		CAPAIAN TRIWULAN II																																					
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9=7/5					10=8/6				
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	292.830.128	-	100.792.231	0,00%	34,42%																																				
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.593.360.000	-	970.570.000	0,00%	37,43%																																				
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	77.500.000	1	67.780.365	100,00%	87,46%																																				
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	174.547.400	4	76.701.000	40,00%	43,94%																																				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	199.953.211	2	199.953.211	100,00%	100,00%																																				
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2	399.999.909	2	-	100,00%	0,00%																																				
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	399.999.796	2	180.227.176	100,00%	45,06%																																				
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	500	274.999.750	500	274.999.749	100,00%	100,00%																																				
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	574.502.078	1	9.055.420	33,33%	1,58%																																				
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	300.050.000	1	176.800.000	100,00%	58,92%																																				
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	99.994.560	-	-	0,00%	0,00%																																				
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	518.682.954	1	91.262.295	20,00%	17,60%																																				
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	161.113.953	-	-	0,00%	0,00%																																				
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	123.398.826	-	89.325.936	0,00%	72,39%																																				
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	58.572.024	-	-	0,00%	0,00%																																				

Kode					Bidang / OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	PERUBAHAN 2025		REALISASI TRIWULAN II		CAPAIAN TRIWULAN II	
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	43.984.336	-	-	0,00%	0,00%
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	187.195.643	-	77.289.642	0,00%	41,29%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	62.165.491	-	62.165.491	0,00%	100,00%
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	79.114.471	-	41.514.244	0,00%	52,47%
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2	55.698.861	-	-	0,00%	0,00%
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	53.220.862	-	11.220.000	0,00%	21,08%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	65.103.611	3	64.875.610	100,00%	99,65%
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	23.179.811	2	23.179.811	100,00%	100,00%
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	17.099.835	-	-	0,00%	0,00%
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	70.482.302	-	-	0,00%	0,00%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	850.000.000	-	-	0,00%	0,00%
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	100.000.000	-	-	0,00%	0,00%
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	100,00%	100,00%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Bidang / OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	PERUBAHAN 2025		REALISASI TRIWULAN II		CAPAIAN TRIWULAN II	
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00%	100,00%
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	300.000.000	-	-	0,00%	0,00%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	223.498.143	-	-	0,00%	0,00%
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	145.456.491	-	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa secara umum capaian kinerja program/kegiatan di Bappelitbangda Kota Ternate triwulan II tahun 2025 mencapai 25,41 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 32,19%, adapun faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja antara lain :

1. Adanya efesiensi anggaran sehingga terjadi penundaan pencairan anggaran kegiatan;
2. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya SDM sehingga keterbatasan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab; dan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan daerah dan satuan polisi pamong praja kota ternate serta Peraturan Walikota Ternate Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, adalah unsur perencana penyelenggaraan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Badan;
3. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah;
4. mengoordinasikan pelaksanaan urusan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
5. mengoordinasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;
7. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di lingkup perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

9. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh walikota untuk kelancaran tugas Pemerintahan daerah;
11. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai unsur perencana penyelenggaraan daerah, maka indikator kinerja pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Ternate

Tujuan	Sasaran/ Program	Indikator Sasaran/Program	Target						Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB			B	BB	
	S1. Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21	20,77	21,44	21,69	22,2	22,63	19,3	19,77	20,21	20,77	
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	87%	90%	92%	94%	96%	97%	86,3%	86,9%	87%	90%	
		Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%	92%	94%	96%	97%	98%	88,3%	89,4%	90%	92%	
Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		87%	90%	92%	94%	96%	97%	85,7%	86,2%	87%	90%		

Tujuan	Sasaran/ Program	Indikator Sasaran/Program	Target						Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA- PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65%	70%	75%	80%	85%	90%	36,2%	35,2%	65%	70%	
		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA- PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	65%	70%	75%	80%	85%	90%	39,2%	37,2%	65%	70%	
		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA- PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	65%	70%	75%	80%	85%	90%	32,5%	33,5%	65%	70%	
	S2. Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	62,5	65	67,5	70	75	43,6	53,58	60	62,5	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,5%	95,8%	96,0%	96,3%	96,5%	97,0%	95,4%	95,5%	95,5%	95,8%	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	18,7%	19,5%	20,3%	21,1%	22,0%	22,8%	17,1%	4,0%	18,7%

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya tersedia data capaian pada perangkat daerah;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal;
5. Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan; dan
6. Pengawasan inovasi belum berjalan optimal

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu strategi Bappelitbangda antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Monev. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang smart, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam perencanaan, penganggaran, monev. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat daerah Pemerintah Prov. & pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti
6. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (*evidence based policy*)
7. Mengoptimalkan fasilitasi, pembinaan dan apresiasi terhadap inovasi daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Ternate tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan rencana kerja dan pendanaan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan rencana kerja dan pendanaan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- a. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Ternate Tahun 2025;
- b. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Ternate.
- c. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappelitbangda Kota Ternate;
- e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
- f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Renja-PD. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappelitbangda Kota Ternate.

Tabel 3.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Ternate

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025						
	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah				19.199.446.686,00	15.629.936.675,00	15.744.858.269,50					15.749.500.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.199.446.686,00	15.629.936.675,00	15.744.858.269,50					15.749.500.000,00	
5 01	PERENCANAAN				16.849.446.686,00	14.245.334.268,00	12.825.903.635,50					14.699.500.000,00	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.756.428.463,00	8.595.683.185,20	8.757.391.352,70					7.899.500.000,00	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.500.000,00	44.999.163,00	44.999.163,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		59.500.000,00	
5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	17.499.567,00	17.499.567,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		10.000.000,00	
5 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.499.826,00	7.499.826,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		10.000.000,00	
5 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	4.999.828,50	4.999.828,50	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		7.500.000,00	
5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.499.959,50	7.499.959,50	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		10.000.000,00	
5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	7.499.982,00	7.499.982,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		22.000.000,00	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.826.282.262,00	4.986.730.108,50	4.986.730.108,50			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		3.856.000.000,00	
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan	576 Orang/bulan	3.816.282.262,00	4.981.730.280,00	4.751.050.280,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		3.850.000.000,00	
5 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.828,50	4.999.828,50	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		6.000.000,00	
5 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000,00	0,00	0,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				155.000.000,00	0,00	0,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	
5 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025							
5 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.448.056.201,00	802.534.553,70	802.534.553,70			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	950.000.000,00		
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	9.968.124,50	9.968.124,50	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		25.000.000,00		
5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	49.998.729,00	49.998.729,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		100.000.000,00		
5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	149.976.000,00	165.546.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		150.000.000,00		
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	320.000.000,00	319.779.700,20	319.779.700,20	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		150.000.000,00		
5 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		25.000.000,00		
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	363.056.201,00	248.062.000,00	248.062.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		500.000.000,00		
5 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	0,00		
5 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.987.680.000,00	2.609.560.560,00	2.609.560.560,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	2.864.000.000,00		
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	365.000.000,00	363.020.560,00	292.830.128,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		364.000.000,00		
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.622.680.000,00	2.246.540.000,00	2.593.360.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		2.500.000.000,00		
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	266.910.000,00	151.858.800,00	151.858.800,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	170.000.000,00		
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.000.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		45.000.000,00		
5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	98.910.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00		
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	125.000.000,00	74.358.800,00	174.547.399,50	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		125.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025						
5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	72.718.023,60	58.572.023,60	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		125.000.000,00	
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	114.984.336,00	43.984.336,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		175.000.000,00	
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	249.445.642,50	187.195.642,50	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		300.000.000,00	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	815.000.000,00	452.835.686,20	452.835.686,20			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	825.000.000,00	
5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	3 Dokumen	275.000.000,00	101.328.491,30	62.165.491,30	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		275.000.000,00	
5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	196.537.471,30	79.114.471,30	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		300.000.000,00	
5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	79.998.861,30	55.698.861,30	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		125.000.000,00	
5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	74.970.862,30	53.220.862,30	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		125.000.000,00	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	800.000.000,00	424.811.558,50	424.811.558,50			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	925.000.000,00	
5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	99.999.610,50	65.103.610,50	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		300.000.000,00	
5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	74.999.811,00	23.179.811,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		150.000.000,00	
5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	99.999.835,00	17.099.835,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		175.000.000,00	
5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	149.812.302,00	70.482.302,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		300.000.000,00	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.350.000.000,00	1.384.602.407,00	2.918.954.634,00					1.050.000.000,00	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.350.000.000,00	1.384.602.407,00	2.918.954.634,00					1.050.000.000,00	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				350.000.000,00	0,00	0,00			01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	0,00	
5 05 02 2.01 0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA Perubahan 2025									
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	800.000.000,00	299.184.543,00	299.184.543,00				01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	450.000.000,00
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.438.310,00	1.250.000.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		200.000.000,00
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.778.933,00	100.000.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		100.000.000,00
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	99.967.300,00	500.000.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		150.000.000,00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	600.000.000,00	699.959.230,00	699.959.230,00				01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional	-	200.000.000,00
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	99.999.035,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	99.993.455,00	100.000.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		200.000.000,00
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	499.966.740,00	300.000.000,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	600.000.000,00	385.458.634,00	385.458.634,00				02. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	400.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	0 Dokumen	0,00	0,00	300.000.000,00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	02. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		0,00
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	240.002.143,00	223.498.143,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		200.000.000,00
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	145.456.491,00	145.456.491,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		200.000.000,00
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Ternate, Kota Ternate Tengah, Maliaro	Dana Alokasi Umum (DAU)	01. Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Profesional		0,00

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Ternate selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kota Ternate. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Bappelitbangda Kota Ternate sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Semoga Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kota Ternate Tahun Anggaran 2025.

Ternate, Juli 2025

**Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Ternate**



Mohd. Taufik Djuhar, S.E., M.Si
NIP. 196602081989021001